

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Padang*



Oleh:

Gusma Yeni

18053024/2018

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

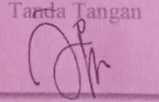
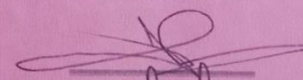

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Gusma Yeni
BP/NIM : 2018/18053024
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Jean Elikal Marna, S.Pd, M.Pd.E	
2	Anggota	Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si	
3	Anggota	Tri Kumiawati, S. Pd, M.Pd	

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

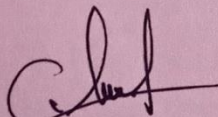
**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Gusma Yeni
BP/NIM : 2018/18053024
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2022

Disetujui oleh

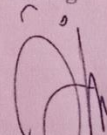
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd

NIP. 19820311 200501 2 005

Pembimbing



Jean Elikal Marna, S.Pd, M.Pd.E

NIDN.0012058802

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusma Yeni
NIM/TM : 18053024/2018
Tempat/Tanggal Lahir : Durian Kadok, 14 agustus 2000
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
No.Handphone : 085265397495
Fakultas : Ekonomi – Universitas Negeri Padang
Judul Skripsi : Analisis Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya, dengan judul Analisis Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah asli karya saya sendiri.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,



Gusma Yeni

NIM. 18053024

ABSTRAK

**Gusma Yeni , 2018/18053024 : Analisis Kemandirian Fiskal Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Pembimbing : Jean Elikal Marna, S.Pd., M.Pd.E**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal di daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020, dengan mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan daerah provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model analisis dengan pendekatan rasio. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sifat data time series dari tahun 2011-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tingkat kemandirian kemandirian keuangan Sumatera Barat berada dalam kategori Delegatif atau sangat baik, (2) tingkat derajat desentralisasi fiskal Sumatera Barat berada pada kategori tingkatan baik, (3) tingkat efektifitas penerimaan daerah Sumatera Barat berada pada kategori sangat efektif, (4) tingkat efisiensi penerimaan daerah Sumatera Barat berada pada kategori kurang efisien.

Kata Kunci : Kemandirian Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektifitas dan Efisiensi Keuangan Daerah.

ABSTRACT

Gusma Yeni , 2018/18053024 : *Regional Fiscal Independence Analysis*
West Sumatra Province
Advisor : *Jean Elikal Marna, S.Pd., M.Pd.E*

This study aims to determine the level of fiscal independence in the province of West Sumatra in 2011-2020, by measuring the level of regional financial independence, the level of fiscal decentralization, the level of effectiveness and efficiency of regional revenues for the province of West Sumatra for 10 years.

This type of research is a quantitative descriptive research. This study uses an analytical model with a ratio approach. The data used in this study is secondary data with the nature of time series data from 2011-2020 obtained from the Central Bureau of Statistics and the Director General of Central and Regional Fiscal Balance.

The results of this study indicate that: (1) the level of financial independence of West Sumatra is in the Delegative or very good category, (2) the degree of fiscal decentralization of West Sumatra is in the good level category, (3) the level of effectiveness of West Sumatra regional revenue is in the category very effective, (4) the level of regional revenue efficiency in West Sumatra is in the less efficient category.

Keywords: Fiscal Independence, Regional Financial Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Effectiveness and Efficiency of Regional Finance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan anugrah-Nya, penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan proposal ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ali Usman (Alm) dan Ibu Darnis yang telah memberikan doa, dukungan, saran, dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd.E selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Jean Elikal Marna, S.Pd, M.Pd.E. selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si. selaku dosen penguji 1 dalam sidang skripsi ini.
7. Ibuk Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd. selaku dosen penguji 2 dalam sidang skripsi ini.
8. Saudara/i penulis, Kak Dahlia, Kak Megawati, Bang Riki dan Bang Rifal yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan penulis, Weni Astuti, Alfida Wardhani, Selvia Wahyuni, Yuni Oktavia, Husnul Khatimah, Isna Pebriani, Fadilla Yessa, Sasa Almanita, Nuraris Santi Dewi, dan Indah Choiriyah yang telah menjadi teman baik, sandaran disaat suka dan duka, mendengarkan setiap keluh kesah penulis, dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Pendidikan Ekonomi International Class angkatan tahun 2018 yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi
11. The last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for all time i spent in this struggle. Thank to me for being strong and sure in facing every challenge and obstacle.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun isinya, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan

menerima kritikan, saran dan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan proposal ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Padang, Oktober 2022
Penulis,

Gusma Yeni
NIM. 18053024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Keuangan Publik	10
2. Otonomi Daerah	12
3. Keuangan Daerah	13
4. Kemandirian Fiskal.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
1. Berdasarkan cara memperoleh data	29
2. Berdasarkan sifat data.....	30
3. Berdasarkan waktu pengumpulan data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Definisi Operasional Variabel.....	30
1. Kemandirian Fiskal.....	30
2. Derajat Desentralisasi Fiskal.....	30
3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi	30
E. Teknik Analisis Data	31
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	31
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	32
3. Rasio Efektivitas PAD	34
4. Rasio Efisiensi PAD.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Kondisi Geografis Sumatera Barat.....	36
C. Kondisi Perekonomian Sumatera Barat.....	38
D. Hasil Penelitian	40
1. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	40
2. Hasil Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	41
3. Hasil Rasio Efektifitas PAD.....	42
4. Hasil Rasio Efisiensi PAD	43
E. Pembahasan	44
1. Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	44
2. Tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	51
3. Tingkat Rasio Efektifitas PAD.....	54
4. Tingkat Rasio Efisiensi PAD.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Anggaran 2017–2021	4
Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	22
Tabel 2.2 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah	23
Tabel 2.3 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	24
Tabel 2.4 Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas	25
Tabel 2.5 Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas	26
Tabel 2.6 Penelitian Relevan	27
Tabel 4.1 Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	40
Tabel 4.2 Hasil Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	42
Tabel 4.3 Hasil Rasio Efektivitas PAD	43
Tabel 4.4 Hasil Rasio Efisiensi PAD	44
Tabel 4.5 Perbandingan Belanja Operasional dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011-2020	58
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk dan Jumlah Puskesmas yang tersedia di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar4.1Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2011-202042.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1.DataPAD ProvinsiSumatera Barat2011-2020	70
Lampiran2.DataTransfer PemerintahSumatera Barat2011-2020	71
Lampiran3.DataTargetdanRealisasiPAD SumateraBarat2011-2020	72
Lampiran 4. Data Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Provinsi SumateraBarat2011-2020.....	73
Lampiran5.DataHasilRasioKKD SumateraBarat2011-2020	74
Lampiran6.DataHasilRasioDDFSumatera Barat2011-2020	75
Lampiran7.DataHasilRasioEfektivitasPADSumateraBarat2011-2020	76
Lampiran8.DataHasilRasioEfisiensiPADSumateraBarat2011-2020.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi kedua dari UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, Indonesia resmi melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada otonomi daerah urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah yang sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Otonomi daerah merupakan upaya pencapaian salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan perkembangan dan hasil-hasilnya. Penetapan kebijakan otonomi daerah membuat jarak antara masyarakat dan pemerintah menjadi semakin dekat, sehingga pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan potensi apa yang dimiliki oleh daerah dan masyarakatnya sehingga memudahkan pemerintah dalam memenuhi dan menyediakan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan terwujud. Pemerintah daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan

daerah. Dengan adanya hubungan yang jelas antara pemerintah daerah dan perangkatnya di berbagai daerah, daerah harus mampu mengembangkan diri lebih terarah sesuai dengan identitasnya masing-masing dan kekhasannya karena desentralisasi dalam otonomi daerah dinilai mampu menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan politik yang efektif (Moonti, 2019). Otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam mengelola daerahnya sendiri agar tercipta daerah yang mandiri yang mampu mengelola sumber daya daerahnya secara efisien dan optimal yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan pusat. Selain itu tujuan dari ditetapkannya otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Huda & Sumiati, 2019).

Menurut (Alhusain, 2017) salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat prosentase Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena kemampuan keuangan daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan (Wandira, 2013) bahwa peranan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menciptakan kemandirian daerah yang merupakan tujuan dari otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal sebagai salah satu kebijakan otonomi daerah secara perspektif teoritis, pelaksanaannya didasari pada tujuan pencapaian kemandirian daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat (Agustina, 2013). Tercapainya aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal (Litvack & Seddon, 1999).

Sumber-sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Namun untuk kegiatan pembangunan daerah pada daerah otonom sudah seharusnya dibiayai oleh pendapatan daerah itu sendiri melalui penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus berupaya memperkecil tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian daerah di era otonomi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan diversifikasi dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru seperti, efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah,

namun dengan tidak membebani masyarakat. Sumber keuangan utama dalam meningkatkan keuangan daerah di era otonomi daerah tentunya diharapkan dari pendapatan asli daerah (Akhmad, 2019).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah, banyaknya potensi lokal, sumber daya alam, sumber daya manusia menjadi modal bagi Sumatera Barat untuk menciptakan daerah yang mandiri. Banyaknya potensi lokal dan sumber daya harusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu berkontribusi lebih terhadap daerah dibandingkan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya besaran kontribusi PAD terhadap total penerimaan anggaran provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini..

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 – 2021 (Dalam Jutaan)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Realisasi		PAD/TPD %	DPB/TPD %
			Pendapatan (TPD)	Pengeluaran (TBD)		
2016	1.964.148.976	2.576.754.985	4.624.674.546	4.504.037.259	42,5%	55,7%
2017	2.134.010.520	3.866.663.233	6.066.826.854	5.759.818.392	35,2%	63,7%
2018	2.275.090.069	3.930.814.211	6.292.287.631	6.267.376.231	36,2%	62,5%
2019	2.328.432.874	4.027.349.115	6.390.337.204	6.551.278.881	36,4%	63,0%
2020	2.251.335.224	4.002.552.881	6.360.411.942	6.444.523.252	35,4%	62,9%
	Rata-Rata =				37,1%	61,6%

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatas ditemukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan sebesar 42,5%, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 35,2%. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 36,2% dan 36,4%. Namun, pada tahun 2020 kontribusi PAD kembali mengalami penurunan sebesar 35,4%. Secara keseluruhan realisasi penerimaan Provinsi Sumatera Barat bahwa porsi penerimaan PAD dari tahun ke tahun tidak stabil dan cenderung rendah, serta ketergantungan terhadap dana bantuan pusat sampai saat ini masih mendominasi. Pada tabel diatas juga terlihat bahwa dana bantuan dari pemerintah pusat cukup besar, lebih dari 50% pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Adanya peningkatan PAD belum dapat membuktikan bahwa provinsi Sumatera Barat telah mandiri dalam hal keuangan, karena dalam hal pembangunan Sumatera Barat masih belum optimal dalam memanfaatkan dan mengalokasikan pendapatan daerah, baik itu Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat. Jika dilihat dari pendapatan daerah sumatera barat, terlihat bahwa jumlah Dana Perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian fiskal daerah provinsi Sumatera Barat

perlu diadakan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan kemandirian keuangan provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud meneliti mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah Sumatera Barat dengan judul “**Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka idendifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah Sumatera Barat terhadap pemerintahan pusat
2. Pendapatan transfer pusat memiliki peran yang sangat tinggi
3. Potensi lokal dan sumber daya Sumatera Barat yang melimpah belum dikelola secara optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera tahun 2011 – 2020 ?
2. Bagaimana tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2020?
3. Bagaimana tingkat rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2020 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

1. Mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera tahun 2011 – 2020 ?
2. Mengetahui tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2020 ?
3. Mengetahui tingkat rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2020 ?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya kajian ekonomi pembangunan, serta dapat memberikan pengetahuan dan pandangan baru yang mendukung teori mengenai kemandirian fiskal pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan teori yang sudah di pelajari semasa kuliah, dan juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi yang bisa dijadikan referensi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah untuk tercapainya keberhasilan otonomi daerah yang tercermin melalui kemandirian keuangan daerah.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dan acuan dalam penelitian.